

Layanan fasilitas sosial yang mendasari efisiensi mobilitas penduduk

Andi Starina Fitri^{1✉}, Ananta Yudono², Arifuddin Akil³

Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Abstrak

Kecamatan Biringkanaya sebagai sub-urban Kota Makassar menerima trickle down effect (Arthur Lewis) pembangunan pusat kota berupa pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman serta berbagai fasilitas sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk memperkecil penumpukan pergerakan masyarakat maka harus dilakukan upaya penguraian pergerakan berdasarkan tujuan dan aktivitas penduduk, sehingga diperlukan fasilitas sosial guna menurunkan beban kota yang semakin berat. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar tingkat pelayanan, tingkat aksesibilitas serta mengetahui model penentuan lokasi fasilitas sosekbud di Kecamatan Biringkanaya sesuai dengan daya layan yang diharapkan penduduk. Teknik analisis data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, kuantitatif, eksisting, spasial, dan service area. Hasil dari penelitian ini: (1) Tingkat aksesibilitas penduduk ke fasilitas sosial berdasarkan hasil analisis service area fasilitas sosial yang sudah terlayani untuk tiap kelurahannya ialah fasilitas peribadatan yaitu masjid, fasilitas Pendidikan SMA, fasilitas Kesehatan rumah sakit, pustu, dan apotek, serta fasilitas niaga berupa toko, pasar tradisional, pasar modern, dan perdagangan dan jasa. (2) Kebutuhan fasilitas sosial di Kecamatan Biringkanaya dibutuhkan pengadaan fasilitas Pendidikan yaitu TK, SD, dan SMP. Fasilitas Kesehatan yaitu praktik mandiri, posyandu dan klinik. Niaga yaitu warung perlu ditambahkan pengadaan. Sarana rekreasi dan kebudayaan yaitu Balai Warga dan Gedung serbaguna.

Kata kunci: Sub urban; fasilitas social; service area; aksesibilitas

Social facility services underlying the efficiency of population mobility

Abstract

Biringkanaya District as a sub-urban city of Makassar has received the trickle down effect (Arthur Lewis) of downtown development in the form of rapid housing and settlement development as well as various social, economic and cultural facilities. To minimize the accumulation of people's movements, efforts must be made to decompose movements based on the goals and activities of the population, so that social facilities are needed to reduce the increasingly heavy burden on the city. This study aims to determine how big the level of service, the level of accessibility and find out the model for determining the location of social, cultural and cultural facilities in Biringkanaya District according to the serviceability expected by the population. The data analysis technique used is descriptive qualitative, quantitative, existing, spatial, and service area. The results of this study: (1) The level of accessibility of residents to social facilities based on the results of service area analysis of social facilities that have been served for each sub-district are worship facilities, namely mosques, high school education facilities, hospital health facilities, pustu, and pharmacies, as well as commercial facilities in the form of shops, traditional markets, modern markets, and trade and services. (2) The need for social facilities in the Biringkanaya District requires the provision of educational facilities, namely kindergarten, elementary and junior high schools. Health facilities, namely independent practice, Posyandu and clinics. Commercials, namely stalls, need to be added to procurement. Recreation and cultural facilities, namely the Community Hall and multipurpose building.

Key words: Sub urban; social facilities; service area; accessibility

PENDAHULUAN

Kepadatan perkotaan menunjukkan peningkatan yang semakin tinggi, ‘mengakibatkan dampak negatif yang semakin luas dalam bidang ekonomi, sosial, administrasi pemerintahan, dan politik. Kepadatan yang terjadi karena tidak seimbangnya antara kebutuhan masyarakat perkotaan dengan fasilitas perkotaan yang tersedia. Sehingga apabila makin besar suatu kota, maka jumlah penduduk makin banyak, sehingga jumlah kebutuhan dalam berbagai kegiatan perkotaan dibutuhkan dukungan akan hal tersedianya sarana dan prasarana perkotaan, baik fasilitas pelayanan ekonomi maupun fasilitas sosial.

Kecepatan pertumbuhan penduduk perkotaan dipengaruhi oleh pola pembangunan terpusat di kota-kota besar. Infrastruktur kota yang lebih baik dengan hadirnya jalan tol, bandar udara, terminal angkutan dalam dan luar kota, pusat pertokoan dilengkapi oleh fasilitas umum telah menimbulkan daya tarik tersendiri. Sehingga kota-kota besar secara terus menerus mengalami tekanan pertambahan penduduk yang terus membesar, dengan arus urbanisasi yang semakin besar.

Sebagian besar jumlah penduduk kota tersebut akan menempati lahan-lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai permukiman, hal ini akan mempengaruhi ketersediaan ruang yang ada di tengah kota yang keberadaannya sudah terbatas. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan akan memicu peningkatan kebutuhan untuk berakutifitas, sehingga perubahan struktur ruang perlu diakomodir sebagai upaya menata pola pergerakan masyarakat mengarah ke pusat kota.

Kota Makassar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.427.619 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,60 yang tersebar di 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Terdapat sekitar 22% pertumbuhan penduduk di area suburban. Di area perkembangan ke arah Timur (Kawasan Tamalanrea, Biringkanaya), 219.425 jiwa. Kecamatan Biringkanaya sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 209.048 jiwa. Dalam penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan populasi di area suburban lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan populasi Makassar (1.63%).

Kawasan Sub-urban khususnya di wilayah penelitian yaitu Kecamatan Biringkanaya saat ini mengalami pola pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga kebutuhan akan fasilitas sosial juga akan mengalami pertambahan. Selain dari data jumlah penduduk hal ini diperkuat juga berdasarkan hasil penelitian bahwa Kecamatan Biringkanaya adalah kecamatan yang terpadat kluster perumahannya dibandingkan dengan kecamatan tetangganya yaitu Kecamatan Tamalanrea, hal ini dapat dilihat pada pola persebaran kluster nya yang memanjang mengikuti jalan arteri primer Jalan Perintis Kemerdekaan yang saling mengisi antara perumahan yang satu dengan perumahan lainnya. Dari fenomena tersebut jumlah penduduk akan semakin meningkat sehingga menimbulkan keterdesakan akan kebutuhan fasilitas umum maupun sosial untuk mendukung setiap aktifitas pergerakannya.

Di Kecamatan Biringkanaya saat ini terdapat fasilitas Pendidikan sebanyak 168 sekolah yang terdiri TK (Taman Kanak-Kanak & Paud) sebanyak 67 sekolah, Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta sebanyak 53 sekolah, Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta sebanyak 25 sekolah, sedangkan Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta terdapat 10 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan swasta terdapat 11 sekolah, selain itu terdapat pula sekolah berada di naungan Kementerian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 sekolah. Sedangkan jumlah sarana Kesehatan tercatat 4 rumah sakit umum/khusus, 4 puskesmas, 6 pusku, 6 rumah bersalin dan 102 posyandu. Karena penduduk Kecamatan Biringkanaya mayoritas beragama Islam maka jumlah masjid cukup memadai yaitu 164 buah Mesjid, adapula 8 buah langgar/surau dan 10 buah gereja. Sarana perdagangan yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya antara lain, mall sebanyak 1 buah, kelompok pertokoan sebanyak 42 buah dan warung makan/kedai makan/minum sebanyak 95 buah.

Kecenderungan yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya khususnya di sepanjang Jalan Perintis maupun setiap ruas jalan nya adanya pola perjalanan yang memusat khususnya perjalanan dari rumah (asal) menuju ke tempat tujuan yang mana pola perjalanannya mencari fasilitas sosial yang berada agak jauh dari lokasi rumahnya (asal), tentunya dengan kondisi seperti ini permukiman baru yang berkembang di Kecamatan Biringkanaya kurang mendapatkan pelayanan yang memadai.

Menurut Tamin (2000) pola perjalanan dibagi dua yaitu perjalanan tidak – spasial dan perjalanan spasial. Konsep mengenai ciri perjalanan tidak – spasial (tanpa batas ruang) di dalam kota, misalnya mengenai mengapa orang melakukan perjalanan, kapan orang melakukan perjalanan, dan jenis angkutan yang mereka gunakan. Sedangkan konsep mengenai ciri perjalanan spasial (dengan batas ruang) di dalam kota berkaitan dengan distribusi spasial tata guna lahan yang terdapat di dalam suatu wilayah.

Lokasi studi penelitian memiliki besaran bangkitan yang cukup besar karena terdapat kantong-kantong permukiman baik yang lama maupun baru berkembang, bangkitan pergerakan tersebut ditimbulkan karena aktifitas manusia di lingkungan ini cenderung memilih memanfaatkan fasilitas sosial diluar dari lingkungannya sehingga terjadi ketidaksinergian antarwilayah hinterland dan pusat kota. Untuk memperkecil penumpukan pergerakan masyarakat maka harus dilakukan upaya penguraian pergerakan berdasarkan tujuan dan aktivitas penduduk, sehingga diperlukan fasilitas sosial guna menurunkan beban kota yang semakin berat.

Dengan dibangunnya fasilitas bersama di lingkungan sekitar tempat tinggal penduduk, beban terhadap fasilitas kota diharapkan berkurang. Tujuan dari pemanfaatan fasilitas bersama dalam keberhasilan suatu perencanaan sebagai bagian dari perencanaan kota, yaitu untuk meminimalkan suatu pola pergerakan manusia untuk mendapatkan pelayanan kualitas dan motivasi dalam mendapatkan pelayanan.

Sehingga berangkat dari kondisi eksisting yang ada, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pola persebaran fasilitas sosial yang berada di kawasan sub urban berdasarkan pola pergerakan penduduk menuju kawasan fasilitas sosial tersebut serta preferensi penduduk.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain analisis data secara induktif, deskriptif, data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar batas yang ditentukan oleh fokus, desain bersifat sementara, serta hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah yang bukan pantai dengan ketinggian permukaan laut lebih kecil dari 500 meter. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan sekitar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km. Letak Kecamatan Biringkanaya berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros, terdapat beberapa kluster perumahan di kecamatan ini, penduduk yang tinggal di daerah ini.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer merupakan data yang didapatkan dalam proses ini yaitu data fungsi bangunan, perubahan jenis kegiatan, perubahan intensitas, pemanfaatan lahan, perubahan teknis massa bangunan di kawasan penelitian serta foto foto terkait variabel penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari media cetak maupun internet yang meliputi jurnal dan literatur - literatur yang terkait dengan tujuan penelitian berupa data BPS Kecamatan Biringkanaya, RTRW Kota Makassar, buku panduan Tata Guna Lahan dan jurnal tentang ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial.

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan sesuai kondisi eksisting, dalam penelitian ini digunakan yaitu analisis kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan standar penyediaan fasilitas sosial diantaranya fasilitas pendidikan (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas), fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas niaga. Analisis ini dilakukan berdasarkan jumlah penduduk untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan fasilitas sosial sesuai dengan SNI 03-1733-2004, selanjutnya mengidentifikasi dan intepetasi ketersediaan fasilitas sosial dan niaga di lokasi penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan dari data-data yang telah dikumpul, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dengan membandingkan antara data-data ketersediaan eksisting (jumlah fasilitas sosial yang ada) yang telah terkumpul dengan data hasil analisis model huff, dan standar pelayanan minimum yaitu standar mengenai petunjuk perencanaan fasilitas sosial (SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota). Sehingga dari hal tersebut akan diperoleh frekuensi kecenderungan masyarakat mengenai kebutuhan fasilitas sosial dan niaga. Adapun indikator penilaian berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota) yaitu: 1) Penilaian berdasarkan jarak jangkauan atau radius pencapaian fasilitas untuk pelayanan wilayah dan 2) Penilaian berdasarkan luas bangunan dan luas lahan untuk menampung masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat pelayanan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya di Kecamatan Biringkanaya mengacu pada Standar Pelayanan dengan melihat jumlah penduduk dan jumlah fasilitas yang tersedia, yang terdiri dari: fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, dan fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan dan niaga serta fasilitas kebudayaan dan rekreasi. Berikut kondisi eksisting fasilitas sosial di Kecamatan Biringkanaya.

Eksisting Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan yang dianalisis tingkat pelayanannya yaitu TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), namun jumlah penduduknya dikelompokkan berdasarkan APK (Angka Partisipasi Kasar) yaitu berdasarkan usia sekolahnya (Standar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI). Fasilitas Pendidikan dikelompokkan berdasarkan skala pelayanannya dan dianalisis dengan mempertimbangkan radius pelayanan (jarak jangkauan) dengan jarak 0,5-3,0 km.

Berikut sebaran kondisi fasilitas Pendidikan di Kecamatan Biringkanaya:

Tabel 1.

Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Biringkanaya

Kelurahan	Fasilitas Pendidikan (Unit)			
	TK	SD	SMP	SMA
Bakung	4	3	2	3
Berua	2	3	3	2
Bulurokeng	2	2	2	1
Daya	1	2	1	1
Katimbang	1	2	-	-
Laikang	12	4	2	2
Paccerakkang	7	4	1	1
Pai	7	7	5	5
Sudiang	8	7	4	4
Sudiang Raya	6	4	3	3
Untia	7	8	1	3
Kecamatan Biringkanaya	57	46	24	25

TK (Taman Kanak-Kanak)

Tingkat pelayanan untuk TK (Taman Kanak-kanak) di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 5-6 tahun sebanyak 2.985 jiwa (APK Siga DP3 Makassar tahun 2022) dengan ketersediaan TK sebanyak 57 unit. Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa jumlah ketersediaan TK di Kecamatan Biringkanaya dengan melihat standar pendukung 1 sekolah melayani 1.250 jiwa, maka jumlah seharusnya sebanyak 2 sekolah yang seharusnya sudah lebih dari cukup melayani dengan tingkat pelayanan sebesar 24%, namun apabila dilihat dari aspek radius pelayanan dengan mengambil analisis service area 500 m terlihat masih ada beberapa titik wilayah yang belum terlayani apalagi dari sisi aksesibilitas menuju tempat fasilitas TK ini, sehingga apabila dilihat dari jumlah APK tidak perlu lagi penambahan fasilitas Pendidikan TK, namun dilihat dari peta radius hampir semua kelurahan masih membutuhkan penambahan fasilitas Pendidikan TK yaitu Kelurahan Katimbang, Kelurahan Berua, Kelurahan Pai.

SD (Sekolah Dasar)

Tingkat pelayanan untuk SD (Sekolah Dasar) di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 7-12 tahun sebanyak 17.703 jiwa (APK Siga DP3 Makassar tahun 2022) dengan jumlah ketersediaan SD di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 46 unit. Dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah ketersediaan SD di Kecamatan Biringkanaya dengan melihat standar pendukung 1 sekolah melayani 1.600 jiwa, maka jumlah seharusnya sebanyak 11 sekolah yang seharusnya sudah lebih dari cukup melayani dengan tingkat pelayanan sebesar 4.15%, namun apabila dilihat dari aspek radius pelayanan dengan mengambil analisis service area 1.000 m terlihat masih ada beberapa bangunan yang belum terlayani apalagi dari sisi aksesibilitas menuju tempat fasilitas SD ini.

SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Tingkat pelayanan untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 13-15 tahun sebanyak 10.367 jiwa (APK Siga DP3 Makassar tahun 2022) dengan

ketersediaan SMP sebanyak 24 unit. Dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah ketersediaan SMP di Kecamatan Biringkanaya dengan melihat standar pendukung 1 sekolah melayani 4.800 jiwa, maka jumlah seharusnya sebanyak 2 sekolah yang seharusnya sudah lebih dari cukup melayani dengan tingkat pelayanan sebesar 11.16%, namun apabila dilihat dari aspek radius pelayanan dengan mengambil analisis service area 1.000 m terlihat masih ada beberapa bangunan yang belum terlayani apalagi dari sisi aksesibilitas menuju tempat fasilitas SMP ini. Ketersediaan SMP di Kecamatan Biringkanaya masih belum cukup melayani setiap kelurahannya, hanya terdapat beberapa kelurahan yang sudah cukup melayani penduduknya dengan ketersediaan SMP tersebut yaitu Kelurahan Pai, Kelurahan Sudiang, dan Kecamatan Bulurokeng. Namun dengan melihat aspek radius pelayanan bahwa ketersediaan SMP di setiap kelurahan masih belum dapat melayani seluruh wilayah yaitu masih terdapat beberapa kelurahan yang berjarak jauh yaitu dengan jarak 1 km yaitu terdapat di Kelurahan Untia, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Berua, dan Kelurahan Bakung.

Tingkat pelayanan untuk SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 16-18 tahun sebanyak 2.719 siswa dengan ketersediaan SMA sebanyak 24 unit, dengan melihat standar pendukung 1 sekolah melayani 4.800 jiwa, maka untuk fasilitas Pendidikan jenjang SMA sudah terpenuhi, ini juga dapat dilihat dari peta radius pelayanan semua wilayah tertutupi sehingga dapat disimpulkan Fasilitas Pendidikan jenjang SMA tidak membutuhkan penambahan fasilitas lagi.

Gambar 1.

Eksisting Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.

Kelurahan	Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Balai Pengobatan	Puskesmas	Posyandu	Apotik
Pacerakkang	2	2	2	2	2
Daya	1	2	1	0	3
Pai	0	1	1	2	8
Sudiang Raya	0	0	1	5	1
Sudiang	0	1	0	1	4
Bulurokeng	1	1	1	2	3
Untia	0	1	1	4	3
Berua	1	1	1	1	10
Katimbang	0	0	0	2	1

Kelurahan	Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Balai Pengobatan	Puskesmas	Posyandu	Apotik
Bakung	0	0	0	2	4
Laikang	0	0	1	3	1
Kecamatan Biringkanaya	5	9	9	24	40

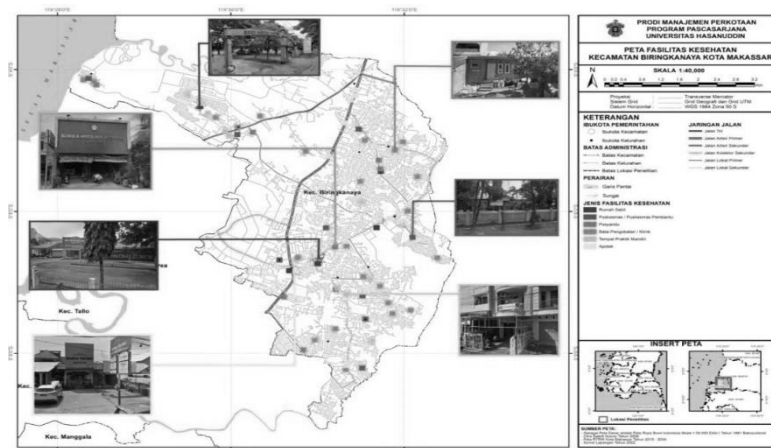
Fasilitas Kesehatan yang di analisis tingkat pelayannya yaitu rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, posyandu, praktek dokter, dan apotik. Fasilitas Kesehatan dikelompokkan berdasarkan skala pelayannya dan dianalisis dengan mempertimbangkan radius pelayanan (jarak jangkauan) dengan jarak 0,5 – 1,5 km.

Tingkat pelayanan untuk rumah sakit di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk di Kecamatan Biringkanaya 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan rumah sakit sebanyak 5 unit, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat Tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Rumah Sakit yaitu 240.000 jiwa per unit rumah sakit, maka tingkat pelayanannya dapat dihasilkan dari hasil analisis yaitu kebutuhan fasilitas untuk melayani penduduk di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 1 unit sehingga masih dapat melayani penduduk dengan besar tingkat pelayanan 544,32% yang berarti masih dapat melayani kebutuhan penduduk di Kecamatan Biringkanaya jumlah penduduk terhadap ketersediaan rumah sakit di Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 44.091 jiwa/unit. Rumah sakit dengan skala pelayanan wilayah belum dapat melayani sepenuhnya yaitu dengan didukung ketersediaan puskesmas bahwa masih terdapat wilayah yang belum terlayani.

Tingkat pelayanan untuk Puskesmas di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah Penduduk di 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Puskesmas di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 9 unit, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Puskesmas yaitu 30.000 jiwa perunit. Jumlah ketersediaan Puskesmas di Kecamatan Biringkanaya masih telah melayani dalam skala perkotaan, sehingga tidak dibutuhkan jumlah fasilitas posyandu di wilayah ini meskipun dilihat dari peta radius pelayanan masih ada bangunan di Kecamatan Untia yang tidak terkena radius pelayanan, namun masih bisa tutupi oleh posyandu dan dokter praktek yang berada di sekitar wilayah ini.

Tingkat pelayanan untuk Posyandu di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah Penduduk di 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Posyandu di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 24 unit, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Puskesmas yaitu 1.250 jiwa perunit posyandu. Pada umumnya Posyandu di Kecamatan Biringkanaya sudah merata di setiap kelurahan sehingga sudah dapat melayani penduduk di setiap kelurahan namun apabila mengacu pada SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 jumlah ketersediaan Posyandu di Kecamatan Biringkanaya masih belum melayani dalam skala perkotaan, sehingga dibutuhkan sekitar penambahan jumlah fasilitas sebanyak 152 unit.

Tingkat pelayanan untuk Apotik di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah Penduduk di 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Apotik di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 40 unit, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Puskesmas yaitu 10.000 jiwa perunit Apotik. Ketersediaan Apotik di Kecamatan Biringkanaya sudah merata di setiap kelurahan sehingga sudah dapat melayani penduduk di setiap kelurahan di Kecamatan Biringkanaya. Rasio jumlah penduduk terhadap ketersediaan Apotik yaitu sebesar 5.511,4 jiwa/unit.



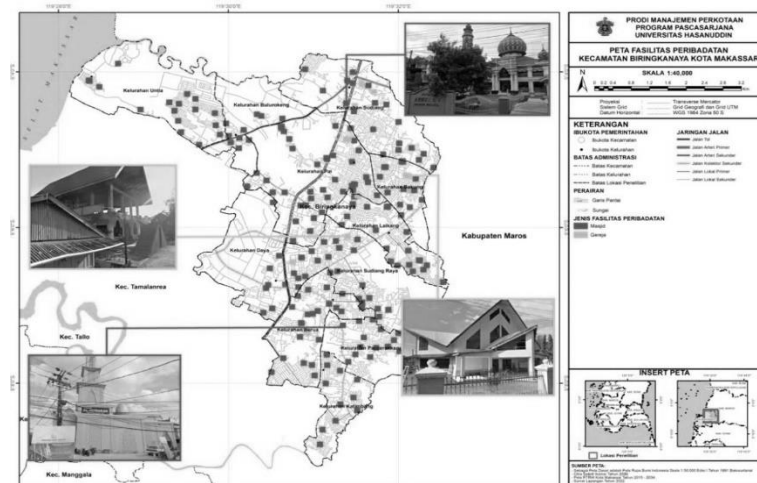
Gambar 2.
 Peta Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Biringkanaya

Eksisting Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan sarana kehidupan yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan batin manusia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan. Berikut adalah sebaran eksisting fasilitas peribadatan di Kecamatan Biringkanaya. Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa Kecamatan Biringkanaya memiliki sarana peribadatan mesjid sebanyak 201 bangunan. Sedangkan jenis sarana peribadatan gereja dengan 16 bangunan. Jumlah dan persebaran lokasi sarana peribadatan di Kecamatan Biringkanaya sudah sesuai dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Namun pada sarana peribadatan Gereja hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus SNI 03-1733-2004 bahwa terdapat banyak selisih antara jumlah eksisting dan jumlah standar sarana peribadatan yang sesuai SNI dalam skala kecamatan atau dengan jumlah penduduk pendukung 120.000 jiwa. Akan tetapi hal ini sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya yang mana jumlah penganut agama yang di Kecamatan ini mayoritas beragama Islam.

Tabel 3.
 Jumlah Sebaran Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Biringkanaya.

Kelurahan	Fasilitas Peribadatan (Unit)	
	Masjid	Gereja
Bakung	14	3
Berua	21	2
Bulurokeng	10	-
Daya	8	-
Katimbang	11	-
Laikang	20	2
Paccerakkang	15	-
Pai	42	2
Sudiang	19	4
Sudiang Raya	24	3
Untia	17	-
Kecamatan Biringkanaya	201	16



Gambar 3.

Peta Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Biringkanaya

Eksisting Fasilitas Perdagangan dan Niaga

Fasilitas Perdagangan dan Niaga yang dianalisis tingkat pelayanannya yaitu Warung, Toko, Jasa, Pasar Tradisional, dan Pasar Modern. Fasilitas perdagangan dikelompokkan berdasarkan skala pelayanannya dan dianalisis dengan mempertimbangkan radius pelayanan (jarak jangkauan) dengan jarak 0,5 – 1,5 km.

Tabel 4.

Jumlah Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Niaga

Kelurahan	Fasilitas Perdagangan dan Niaga (Unit)				
	Pasar Modern	Pasar Tradisional	Toko	Jasa	Warung
Bakung	-	-	49	4	-
Berua	-	-	85	14	22
Bulurokeng	-	1	19	16	86
Daya	4	2	348	25	91
Katimbang	-	-	20	3	5
Laikang	-	1	31	12	-
Paccerakkang	-	-	14	6	-
Pai	1	-	151	30	80
Sudiang	-	1	172	34	57
Sudiang Raya	-	-	70	22	36
Untia	-	-	97	43	152
Kecamatan Biringkanaya	5	5	1056	209	529

Warung

Tingkat pelayanan untuk Warung di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Warung di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 529 unit, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Warung yaitu 250 jiwa/unit. Ketersediaan Warung di Kecamatan Biringkanaya belum merata secara keseluruhan yaitu terdapat kelurahan yang masih perlu diadakannya warung dari hasil analisis kebutuhan dan tingkat pelayanan yaitu Kelurahan Bakung, Kelurahan Laikang dan Kelurahan Paccerakkang. Rasio jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya terhadap ketersediaan Warung yaitu sebesar 416, 74 jiwa/unit.

Toko

Tingkat pelayanan untuk Toko di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya yaitu 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Toko di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 1.056 unit, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Toko yaitu 6.000 jiwa per unit Toko. Ketersediaan Toko di Kecamatan Biringkanaya sudah merata di setiap kelurahan sehingga sudah dapat melayani penduduk di setiap kelurahan di Kecamatan Biringkanaya. Rasio jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya terhadap ketersediaan Toko yaitu sebesar 208,76 jiwa/unit. Namun dengan melihat aspek radius pelayanan bahwa

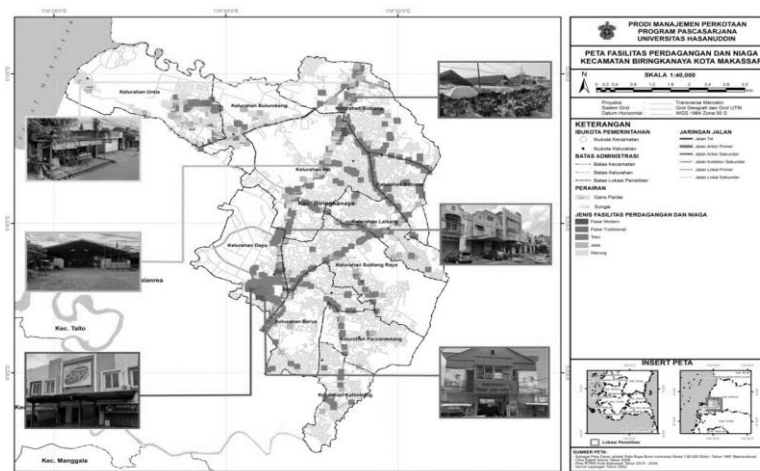
ketersediaan Toko masih perlu penambahan demi melayani seluruh wilayah dengan jarak dekat yaitu 0,5 km.

Pasar Modern

Tingkat pelayanan untuk Pasar Modern di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya yaitu 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Pasar Modern di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 5 unit yaitu Daya Grand Square, Indogrosir, Mall Daya Business Centre, New Dafest Cullinary Station, Pasar daya Modern, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Pasar Modern yaitu 30.000 jiwa per unit Pasar Modern, bahwa ketersediaan Pasar Modern di Kecamatan Biringkanaya sudah cukup terpenuhi namun apabila dilihat dari sisi kapasitas penduduknya berdasarkan standar masih perlu penambahan. Rasio jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya terhadap ketersediaan pasar modern yaitu sebesar 44.091,2 jiwa/unit. Namun dengan melihat aspek radius pelayanan bahwa ketersediaan pasar modern masih perlu penambahan demi melayani seluruh wilayah dengan jarak dekat yaitu 0,5 km.

Pasar Tradisional

Tingkat pelayanan untuk Pasar Tradisional di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya yaitu 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Pasar Tradisional di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 5 unit yaitu Pasar Tradisional Daya, Pasar Daya Perintis, Pasar Pusat Niaga Daya, Pasar Senggol Laikang, dan Pasar Villa Mutiara, sedangkan untuk penduduk pendukung menurut SK Menteri Tempat tinggal dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001 untuk Pasar Tradisional yaitu 30.000 jiwa per unit Pasar Tradisional. Dapat dilihat dari tabel tersebut diatas bahwa ketersediaan pasar di Kecamatan Biringkanaya belum dapat melayani kebutuhan masyarakat apalagi bagi masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari jalan arteri Jalan Perintis Kemerdekaan yang mana jalan ini tumbuh dan berkembang pusat-pusat ekonomi yang baru.



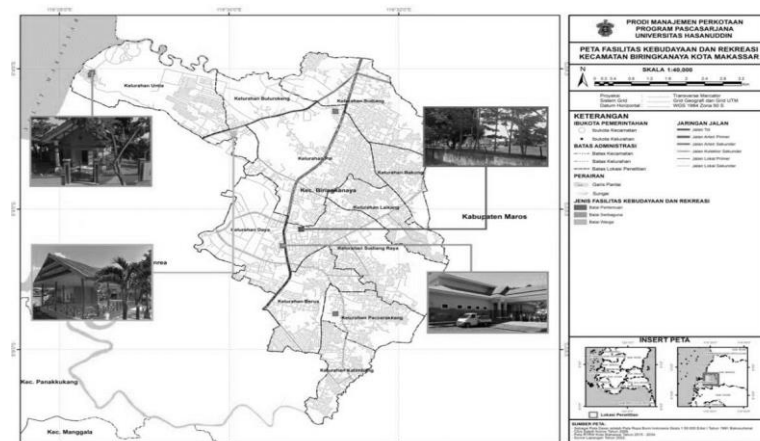
Gambar 4.
Peta Fasilitas Perdagangan dan Niaga

Eksisting Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi

Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi yang dianalisis tingkat pelayanannya yaitu Balai Pertemuan, Balai Serbaguna, dan Balai Warga. Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi dikelompokkan berdasarkan skala pelayanannya dan dianalisis dengan mempertimbangkan radius pelayanan (jarak jangkauan) dengan jarak 0,5 – 1,5 km.

Tabel 5.
 Jumlah Sebaran Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi

Kelurahan	Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi (Unit)		
	Balai Pertemuan	Balai Serbaguna	Balai Warga
Bulurokeng	-	-	1
Daya	-	1	-
Paccerakkang	-	1	-
Pai	-	1	-
Sudiang Raya	1	-	-
Untia	-	2	-
Kecamatan Biringkanaya	1	5	1



Gambar 5.
 Peta Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi

Fasilitas kebudayaan dan rekreasi di Kecamatan Biringkanaya berupa Balai pertemuan dari standar yang ada yaitu SNI 03-1733-2004 sebanyak 2.500 jiwa/unit yang jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya sebanyak yaitu 220.456 jiwa dan jumlah ketersediaan Balai Pertemuan di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 1 unit yaitu Gedung Laoly Wardhana Kasekhanudnas II, walaupun terdapat gedung pertemuan di Kecamatan Biringkanaya namun gedung yang berada di lokasi penelitian tidak dibuka untuk masyarakat publik melainkan hanya di pergunakan khusus bagi seluruh warga Kosekhanudnas II sehingga dari sisi kapasitas penduduknya berdasarkan standar masih perlu penambahan. Sedangkan, untuk balai serbaguna dari standar yang ada yaitu SNI 03-1733-2004 sebanyak 30.000 jiwa/unit dan jumlah ketersediaannya sebanyak 5 unit yang tersebar di Kelurahan Untia sebanyak 2 unit salah satunya yaitu balai lembaga pemberdayaan masyarakat Untia. Untuk balai warga sendiri standar yang ada yaitu SNI 03-1733-2004 sebanyak 120.000 jiwa/unit, yang mana di lokasi penelitian terdapat 1 unit balai warga yaitu Baruga Suka Dg Lurang berdasarkan hasil perhitungan dibutuhkan penambahan 1 unit balai warga untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan:

Kondisi fasilitas sosial di Kecamatan Biringkanaya berdasarkan hasil pembagian kuesioner hampir semua tersedia fasilitas sosial yang berada dilingkungannya, namun masih ada beberapa kelurahan yang belum tersedia. Adapun waktu tempuh serta aksesibilitas yang dibutuhkan menuju fasilitas sosial rata-rata penduduk membutuhkan waktu tempuh sekitar 6-10 menit baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pribadi dan sebagian besar terjangkau oleh fasilitas sosial. Kondisi bangunan untuk setiap fasilitas sosial rata-rata terbilang sudah baik.

Tingkat aksesibilitas penduduk ke fasilitas sosial berdasarkan hasil pehitungan dan hasil analisis service area fasilitas sosial yang sudah terlayani untuk tiap kelurahannya di Kecamatan Biringkanaya ialah fasilitas peribadatan yaitu masjid, fasilitas Pendidikan SMA, fasilitas Kesehatan rumah sakit, pustu, dan apotek, serta fasilitas niaga berupa toko, pasar tradisional, pasar modern, dan perdagangan dan jasa.

Kebutuhan fasilitas sosial di Kecamatan Biringkanaya dibutuhkan pengadaan fasilitas Pendidikan yaitu TK, SD, dan SMP. Fasilitas Kesehatan yaitu praktik mandiri, posyandu dan klinik. Perdagangan niaga yaitu warung perlu ditambahkan pengadaan. Sedangkan untuk sarana rekreasi dan kebudayaan yaitu balai warga dan Gedung serbaguna.

Dengan demikian perlunya dilakukan upaya peningkatan kualitas secara komprehensif terhadap kondisi fasilitas sosial yang ada serta menyediakan fasilitas sosial yang belum terpenuhi di Kecamatan Biringkanaya. Hal ini perlu juga dipertimbangkan oleh pemerintah kota Makassar dengan ikut berpartisipasi terkait kondisi fasilitas sosial yang berada di Kecamatan Biringkanaya yang tidak memenuhi standar dan mengevaluasi kembali ketersediaan fasilitas sosial sesuai dengan peraturan agar lebih diperhatikan lagi agar masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan yang sesuai fungsinya. Serta diharapkan perlu diadakan suatu penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam (secara kualitatif) terkait fasilitas sosial baik Pendidikan, kesehatan, niaga, peribadatan, maupun rekreasi dan budaya secara lebih terinci terkait hubungannya dengan lingkungan, ekonomi, dan budaya yang berada disekitar lokasi penelitian, namun juga unsur-unsur kelembagaan yang berinteraksi dengan mereka di lokasi penelitian, sehingga dapat secara komprehensif merekam fenomena yang diteliti dari sudut pandang yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderamo, A. J., & Aina, O. (2011). Spatial inequalities in accessibility to social amenities in developing countries: A case from Nigeria. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(6), 316-322.
- BPS (2022). Kecamatan Biringkanaya dalam Angka. Makassar: Badan Pusat Statistik
- BPS (2022). Makassar dalam Angka. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Iswahyudin, I., Manaf, M., & Salim, A. (2018). Pola Pergerakan Penduduk Pekerja di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sebagai Daerah Hinterland Kota Makassar. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 7(2), 118-131.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987, Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
- Putra, W. A., Masrizal, M., & Astuti, P. (2016). Analisis Pola Pergerakan Penduduk dalam Mengonsumsi Fasilitas Sosial di Kawasan Pinggiran Kota (Studi Kasus: Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Jurnal Saintis*, 16(2), 67-80.
- Rachmani, W. I., & Hidayat, M. (2010). Studi Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan Pusat Perbelanjaan di Kota Tangerang. *Jurnal PLANESATM Vol*, 1(1).
- Tarigan, Robinson. (2012). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rumengan, M. R. C., Kindangen, J. I., & Takumansang, E. D. (2019). Analisis ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial di Kota Kotamobagu. *SPASIAL*, 6(2), 375-387.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tamin, Ofyar, Z. (2000). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB
- Yhee, H., Kim, S., & Kang, S. (2021). GIS-based evaluation method for accessibility of social infrastructure facilities. *Applied Sciences*, 11(12), 5581.